

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab lima maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berkaitan dengan mekanisme penyaluran, pengelolaan penatausahaan dan akuntansi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dana bergulir yakni dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Pemerintah Kota Kupang dikelola oleh Satuan Kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), Pengakuan dana bergulir yakni dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini pada saat pelaksanaan penganggaran diakui sebagai belanja hibah. kemudian pada saat pengguliran diakui sebagai pemberian pinjaman dan pengembalian dari masyarakat diakui sebagai pengembalian pokok pinjaman. Tidak ada pendapatan bunga dari pokok pinjaman yang diakui karena dana PEM diberikan kepada masyarakat untuk menambah modal usaha sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok pinjaman saja, terkecuali pendapatan yang didapat dari bunga bank diakui sebagai penambahan modal dana bergulir yakni dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dicatat dalam

Buku Kas Umum (BKU), jurnal, Buku Besar, rekapan SPJ, dan pengesahan. Rekening yang digunakan adalah rekening belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan. Bagian penatausahaan laporan keuangan akan mencatat di laporan keuangan yaitu di laporan realisasi anggaran pada belanja operasi di kode rekening belanja bantuan keuangan berupa besaran dana yang direalisasikan.

2. Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tunggakan dana bergulir yakni dana PEM, maka dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pengembalian dana PEM terjadi karena; a) Kegiatan usaha dari masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang tidak optimal; b) Pemahaman yang keliru dari masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM); c) Adanya unsur kesengajaan dari peminjam dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM); d) Keadaan *force major*; e) Mekanisme penagihan yang belum optimal. Dengan kata lain pihak peminjam dan pihak yang memberi pinjaman sama-sama mempunyai kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

6.2. Saran

1. Bagi pihak pengelola dana bergulir perlu mendata kembali dana bergulir yang dikelola pada masing-masing kelurahan dan melakukan pengkategorian berdasarkan tingkat dan masa jatuh tempo pengembalian dana. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengetahui berapa besar dana yang harus dikembalikan, besaran dana yang telah jatuh tempo, besaran

dana yang macet dan tidak mungkin tertagih. Data ini kemudian dapat digunakan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan sistem pengelolaan dan penagihan yang tepat sasaran.

2. Bagi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dana bergulir yakni dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi kembali terkait penganggaran dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ini, jika tidak sebaiknya pemerintah harus mengubah kebijakannya agar pemberian dana ini disertai dengan adanya bunga sehingga masyarakat peminjam akan terdorong untuk membayar pinjaman secara tepat waktu.
3. Fasilitator di tiap-tiap kelurahan harusnya ditambah agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjangkau semua masyarakat peminjam. Pengawasan yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat memberikan efek positif bagi proses pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Dan bagi masyarakat yang menunggak melewati masa jatuh tempo sebaiknya diberikan sanksi yang tegas bukan hanya peringatan tertulis sehingga ada efek jera dari masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*: Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hutomo, Mardi, Y, 2003. *Konsep Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta
- Kartasasmita, Ginandjar, *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*; Jakarta: CIDES, 1995.
- , *Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri: Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika, dan Peran Birokrasi dalam Pembangunan*; Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 15 April 1995.
- , *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Pembangunan. Universitas Brawijaya; Malang, 27 Mei 1995.
- , *Administrasi Pembangunan*; Bahan Kuliah Bagian I; Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; Malang, 1995.
- Keputusan Wali Kota Kupang Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/Kep/Hk/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15a/Kep/Hk/2013 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang *Akuntansi Hibah*. Salemba Empat. Jakarta

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang *Akuntansi Dana Bergulir*. Salemba Empat. Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Ritonga, Irwan, T, 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta
- Suharso, Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya. Semarang
- Wasito, Hermawan, dkk. 1990. *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik. Jakarta